

PENGARUH PELAKSANAAN AKSI KONVERGENSI STUNTING TERHADAP CAKUPAN PROGRAM INTERVENSI GIZI SENSITIF DI PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR

INTJE PICAULY

Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Nusa Cendana

Alamat Email Penulis : intjepicauly@staf.undana.ac.id

ABSTRAK

Stunting merupakan prediktor rendahnya kualitas sumber daya manusia sehingga pencegahan dan penanggulangan stunting menjadi sangat penting. Upaya percepatan pencegahan stunting lebih efektif apabila semua program intervensinya dilakukan secara konvergen. Dengan mekanisme konvergensi akan tercipta keterpaduan proses mulai dari proses perencanaan, penganggaran, dan pemantauan program/kegiatan pemerintah dari berbagai lintas sektor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan aksi konvergensi stunting terhadap peningkatan cakupan program intervensi gizi sensitif di Propinsi Nusa Tenggara Timur. Variabel bebas (x) yang menjadi fokus penelitian ini adalah pelaksanaan delapan (8) aksi konvergensi pada lima (5) organisasi pemerintahan daerah (OPD) yang terkait langsung dalam 10 cakupan intervensi gizi sensitif pada 21 kabupaten. Adapun OPD yang dimaksud antara lain : 1). Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; 2). Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPPKB), 3). Dinas Sosial, 4). Dinas Pekerjaan Umum/Perumahan Rakyat, dan 5). Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Sedangkan variabel terikat yang dianalisis bersama variabel bebas diatas yaitu tingkat cakupan program intervensi sensitif (y). Sampel yang digunakan adalah lima (5) OPD pada 21 kabupaten di Propinsi NTT sebanyak 105 OPD. Jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder yaitu hasil analisis situasi dari pelaksanaan aksi 1 konvergensi 5 OPD pada 21 kabupaten. Sedangkan data cakupan program intervensi gizi sensitif diperoleh dari laporan kinerja kabupaten dengan jumlah 10 cakupan program intervensi. Nilai setiap cakupan pada 5 OPD dijadikan satu nilai gabungan menjadi nilai cakupan program intervensi gizi sensitif dan dianalisis bersama variabel bebas yaitu pelaksanaan masing-masing aksi konvergensi (8 aksi). Jenis penelitian adalah kualitatif deskriptif dengan rancangan crossectional study. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan analisis univariat dan bivariat dengan uji chi square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar 50-60% OPD telah melaksanakan aksi konvergensi stunting dengan baik. Sedangkan hasil analisis statistik menunjukkan bahwa pelaksanaan aksi konvergensi stunting mulai dari aksi 1 ($pvalue = 0,000 < 0.05$); aksi 2 ($pvalue = 0,036 < 0.05$); aksi 3 ($pvalue = 0,000 < 0.05$); aksi 4 ($pvalue = 0,000 < 0.05$); aksi 5 ($pvalue = 0,024 < 0.05$); aksi 6 ($pvalue = 0,042 < 0.05$); aksi 7 ($pvalue = 0,033 < 0.05$); dan aksi 8 ($pvalue = 0,047 < 0.05$) semuanya berpengaruh nyata terhadap tingkat cakupan program intervensi sensitif. Sedangkan variabel aksi konvergensi 1 (analisis situasi) berperan menjadi vaktor prediktor sedangkan aksi 2-8 menjadi vaktor risiko terhadap tingkat cakupan program aksi intervensi gizi sensitif dari lima (5) dinas pemerintahan daerah di wilayah 21 kabupaten Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Kata kunci : aksi konvergensi, stunting, cakupan program intervensi, gizi sensitif, organisasi pemerintah daerah

THE INFLUENCE OF IMPLEMENTATION OF THE STUNTING CONVERGENCE ACTION ON THE COVERAGE OF THE SENSITIVE NUTRITION INTERVENTION PROGRAM IN THE PROVINCE OF NUSA TENGGARA TIMUR

INTJE PICAULY

Public Health Study Program, Public Health Faculty

Nusa Cendana University

Author Address : intjepicauly@staf.undana.ac.id

ABSTRACT

Stunting is a predictor of the low quality of human resources so stunting prevention and control is very important. Efforts to accelerate stunting prevention are more effective if all intervention programs are carried out convergently. With the convergence mechanism, process integration will be created starting from the planning, budgeting, and monitoring of government programs/activities from various cross-sectors. This study aims to determine the effect of implementing the stunting convergence action on increasing the coverage of sensitive nutrition intervention programs in East Nusa Tenggara Province. The independent variable (x) which is the focus of this research is the implementation of eight (8) convergence actions in five (5) local government organizations (OPD) that are directly related to 10 coverage of sensitive nutrition interventions in 21 districts. The OPD in question include: 1). Department of Education and Culture; 2). Office of Women's Empowerment and Family Planning (DPPKB), 3). Social Service, 4). Public Works/People's Housing Office, and 5). Department of Agriculture and Food Security. While the dependent variable which was analyzed together with the independent variables above is the level of coverage of the sensitive intervention program (y). The sample used is five (5) OPD in 21 districts in NTT Province as many as 105 OPD. The type of data used is secondary data, namely the result of situation analysis from the implementation of action 1 convergence of 5 OPD in 21 districts. Meanwhile, data on the coverage of sensitive nutrition intervention programs were obtained from district performance reports with a total of 10 intervention program coverages. The value of each coverage in the 5 OPDs is made into a combined value to become the coverage value of the sensitive nutrition intervention program and analyzed together with the independent variable, namely the implementation of each convergence action (8 actions). This type of research is descriptive qualitative with a cross-sectional study design. The collected data was then analyzed using univariate and bivariate analysis with chi square test. The results showed that around 50-60% of OPD had implemented stunting convergence actions well. While the results of statistical analysis show that the implementation of stunting convergence action starts from action 1 (pvalue = $0.000 < 0.05$); action 2 (pvalue = $0.036 < 0.05$); action 3 (pvalue = $0.000 < 0.05$); action 4 (pvalue = $0.000 < 0.05$); action 5 (pvalue = $0.024 < 0.05$); action 6 (pvalue = $0.042 < 0.05$); action 7 (pvalue = $0.033 < 0.05$); and action 8 (pvalue = $0.047 < 0.05$) all significantly affected the level of coverage of sensitive intervention programs. While the convergence action variable 1 (situation analysis) plays a role as a predictor factor, while actions 2-8 become a risk factor for the level of coverage of the sensitive nutrition intervention action program from five (5) local government agencies in the 21 districts of East Nusa Tenggara Province.

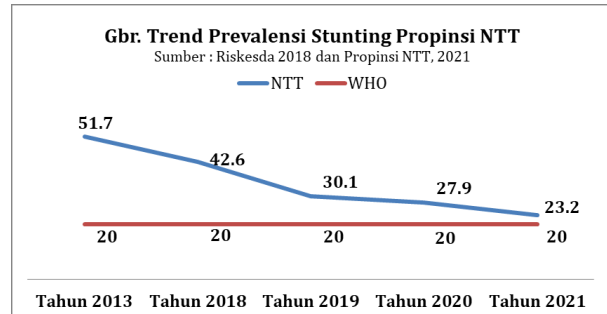
Key words : *convergence action, stunting, coverage of intervention programs, sensitive nutrition, local government organizations*

PENDAHULUAN

Stunting atau sering disebut pendek tidak proporsional adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu dari janin hingga anak berusia 23 bulan (TNP2K dan Setwapres RI, 2018). Dampak jangka pendek pada anak yang mengalami stunting adalah gangguan pertumbuhan tubuh, gangguan metabolisme, gangguan perkembangan otak, hingga memengaruhi kecerdasan anak. Hasil penelitian menemukan bahwa jangka panjang akan berakibat pada anak yang bertubuh pendek akan berpeluang besar untuk memperoleh jumlah pendapatan yang lebih rendah pada saat dewasa. Oleh karena itu, stunting merupakan masalah gizi yang harus di tanggulangi atau dicegah sedini mungkin.

Upaya percepatan pencegahan stunting akan lebih efektif apabila program intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif dilakukan secara konvergen. Konvergensi penyampaian layanan membutuhkan keterpaduan proses perencanaan, penganggaran, dan pemantauan program/kegiatan pemerintah secara lintas sektor untuk memastikan tersedianya setiap layanan intervensi gizi spesifik kepada keluarga sasaran prioritas dan intervensi gizi sensitif untuk semua kelompok masyarakat, terutama masyarakat miskin. Dengan kata lain, konvergensi didefinisikan sebagai sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu, dan bersama-sama pada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas untuk mencegah stunting.

Propinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu wilayah lokus stunting dengan kecenderungan prevalensi stunting selalu menurun namun besar persentase prevalensi tersebut masih lebih tinggi dari standart WHO (Gambar 1). Oleh karena itu, penyelenggaraan intervensi secara



konvergen harus dilaksanakan dengan menggabungkan atau mengintegrasikan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan bersama yaitu penurunan prevalensi stunting. Berdasarkan kondisi tersebut maka penelitian ini dirasakan penting untuk dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan aksi konvergensi terhadap pencapaian cakupan intervensi gizi sensitif di Propinsi Nusa Tenggara Timur.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian adalah kualitatif deskriptif dengan rancangan *crosssectional study* dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan aksi konvergensi stunting terhadap peningkatan cakupan program intervensi gizi sensitif di Propinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2020. Sampel yang digunakan adalah lima (5) OPD pada 21 kabupaten di

Propinsi NTT sehingga jumlah sampel sebanyak 105 instansi. Adapun OPD yang dimaksud antara lain : 1). Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; 2). Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPPKB), 3). Dinas Sosial, 4). Dinas Pekerjaan Umum/Perumahan Rakyat, dan 5). Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Adapun variabel bebas (x) yang menjadi fokus penelitian ini adalah pelaksanaan delapan (8) aksi konvergensi pada lima (5) organisasi pemerintahan daerah (OPD) yang terkait langsung dalam 10 cakupan intervensi gizi sensitif pada 21 kabupaten. Sedangkan variabel terikat yang dianalisis bersama variabel bebas diatas yaitu tingkat cakupan program intervensi sensitif (y). Adapun jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder yaitu hasil analisis situasi dari pelaksanaan aksi 1 konvergensi 5 OPD pada 21 kabupaten. Sedangkan data cakupan program intervensi gizi sensitif diperoleh dari laporan kinerja kabupaten dengan jumlah 10 cakupan program intervensi. Nilai setiap cakupan pada 5 OPD dijadikan satu nilai gabungan menjadi nilai cakupan program intervensi gizi sensitif dan dianalisis bersama variabel bebas yaitu pelaksanaan masing-masing aksi konvergensi (8 aksi). Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan analisis univariat dan bivariat dengan uji chi square dengan menggunakan derajat kemaknaan $\alpha=5\%$ untuk melihat ada tidaknya pengaruh yang bermakna antara variabel bebas dan terikat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh antara faktor pelaksanaan aksi konvergensi stunting (8 Aksi) terhadap peningkatan cakupan program intervensi sensitif di Propinsi Nusa Tenggara Timur

Penanganan penurunan stunting di Propinsi Nusa Tenggara Timur telah dilaksanakan sejak tahun 2007 - 2020. Namun, perkembangan penurunan prevalensi stunting belum mencapai tingkat perubahan yang signifikan. Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting) telah dilaksanakan sejak tahun 2018 dengan tujuan untuk mempercepat penurunan Stunting dalam kerangka kebijakan dan institusi yang ada. Salah satu strategi yang dikenal dengan sistem konvergensi ini diselenggarakan di semua tingkatan pemerintah dengan melibatkan berbagai institusi pemerintah yang terkait maupun pihak non pemerintah seperti swasta, masyarakat, dan komunitas dengan berbagai program atau kegiatannya.

Untuk meningkatkan keterpaduan/terintegrasinya berbagai program/kegiatan antartingkat pemerintahan (pusat, provinsi, kabupaten/kota dan desa) yang sesuai dengan kebutuhan lokasi fokus dan untuk penyampaian intervensi gizi prioritas bagi Rumah Tangga 1.000

HPK, Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan delapan (8) Aksi Integrasi. Adapun delapan aksi dimaksud antara lain :

1. Analisis Situasi Program Penurunan Stunting (Aksi 1)
2. Penyusunan Rencana Kegiatan (Aksi 2)
3. Rembuk Stunting (Aksi 3)
4. Perwali/Perbup Peran Desa/Kelurahan (Aksi 4)
5. Pembinaan Kader Pembangunan Manusia (Aksi 5)
6. Sistem Manajemen Data (Aksi 6)
7. Pengukuran dan Publikasi Data Stunting (Aksi 7)
8. Reviu Kinerja Tahunan (Aksi 8)

Aksi-aksi integrasi ini bertujuan untuk menunjang perencanaan dan penganggaran berbasis data/informasi guna meningkatkan kesesuaian pengalokasian program/kegiatan dari berbagai sumber pendanaan dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan intervensi. Hasil penelitian pada Tabel 1 menunjukkan bahwa lebih dari sebagian OPD (>50%) telah melaksanakan aksi konvergensi stunting 1-8 dengan baik. Lebih lanjut diketahui juga bahwa hasil analisis statistik menunjukkan adanya pengaruh yang nyata ($p\text{value} < 0.05$) dalam pelaksanaan aksi konvergensi 1-8 terhadap tingkat cakupan program intervensi gizi sensitif (Tabel 1).

Tabel 1. Pengaruh antara faktor pelaksanaan aksi konvergensi stunting terhadap peningkatan cakupan program intervensi sensitif di Propinsi Nusa Tenggara Timur

Indikator		Cakupan Program Intervensi Gizi Sensitif				Jumlah		Hasil Analisis	
		Baik	%	Buruk	%	n	%	pValue	OR (95% CI)
Pelaksanaan Aksi I	Baik	9	81.8	2	18.2	11	100	0,000	0,76 (0,967-2,535)
	Cukup	2	28.6	5	71.4	7	100		
	Buruk	1	33.3	2	66.7	3	100		
Pelaksanaan Aksi II	Baik	8	61.5	5	38.5	13	100.0	0,036	1,688 (1,034-2,755)
	Cukup	1	50.0	1	50.0	2	100.0		
	Buruk	3	50.0	3	50.0	6	100.0		
Pelaksanaan Aksi III	Baik	6	66.7	3	33.3	9	100.0	0,000	3,744 (2,285-6,136)
	Cukup	3	60.0	2	40.0	5	100.0		
	Buruk	3	42.9	4	57.1	7	100.0		
Pelaksanaan	Baik	6	66.7	3		9		0,000	2,585

Indikator		Cakupan Program Intervensi Gizi Sensitif				Jumlah		Hasil Analisis	
		Baik	%	Buruk	%	n	%	pValue	OR (95% CI)
Aksi IV					33.3		100.0		(1,717-3,891)
	Cukup	4	66.7	2	33.3	6	100.0		
	Buruk	2	33.3	4	66.7	6	100.0		
Pelaksanaan Aksi V	Baik	6	60.0	4	40.0	10	100.0	0,024	3,172 (1,967-5,116)
	Cukup	2	50.0	2	50.0	4	100.0		
	Buruk	5	62.5	3	37.5	8	100.0		
Pelaksanaan Aksi VI	Baik	2	50.0	2	50.0	4	100.0	0,042	1,917 (1,018-3,610)
	Cukup	2	50.0	2	50.0	4	100.0		
	Buruk	8	61.5	5	38.5	13	100.0		
Pelaksanaan Aksi VII	Baik	9	69.2	4	30.8	13	100.0	0,033	1,868 (1,430-2,550)
	Cukup	1	33.3	2	66.7	3	100.0		
	Buruk	2	40.0	3	60.0	5	100.0		
Pelaksanaan Aksi VIII	Baik	7	63.6	4	36.4	11	100.0	0,047	1,719 (1,023-3,610)
	Cukup	2	40.0	3	60.0	5	100.0		
	Buruk	3	60.0	2	40.0	5	100.0		

Tabel 1 menunjukkan bahwa pelaksanaan aksi 1-4 dan aksi 7-8 mempunyai tingkat cakupan yang baik dibanding pelaksanaan aksi 5 – 6. Hal ini berarti bahwa sebagian besar OPD telah memahami dan melakukan pelaksanaan aksi konvergensi stunting dengan baik sehingga mempunyai cakupan program intervensi gizi sensitif baik (>60%).

Aksi 1 konvergensi stunting adalah aktivitas melakukan identifikasi sebaran stunting, ketersediaan program, dan kendala dalam pelaksanaan integrasi intervensi gizi. Pada proses aksi ini, akan diperoleh informasi tentang prevalensi stunting menurut desa (data sebaran stunting) sampai pada penentuan desa lokus atau desa prioritas stunting. Data ini selanjutnya akan diserahkan ke pusat data tertinggi yaitu puskesmas dan kabupaten. Perangkat Daerah dapat menjadikan data sebaran stunting dan desa lokus sebagai acuan dalam perencanaan dan penganggaran atau perubahan anggaran tahun berjalan demi kelancaran aksi konvergensi.

Penelitian ini menemukan bahwa sebagian besar 52.4% OPD yang melaksanakan aksi satu (1) konvergensi stunting dengan baik dibanding capaian pelaksanaan aksi

lainnya (Tabel 1). Berdasarkan hasil analisis statistik diketahui bahwa pelaksanaan aksi satu (1) konvergensi berpengaruh nyata terhadap tingkat cakupan program intervensi gizi sensitif ($p\text{-value} = 0.000 < 0.05$). Data menunjukkan bahwa sebagian besar (81.8%) OPD yang melakukan pelaksanaan aksi I konvergensi stunting mempunyai cakupan program intervensi gizi sensitif baik.

Tabel 1 juga menunjukkan bahwa cakupan program intervensi yang buruk/rendah dapat diprotek/dihindari dengan melaksanakan aksi 1 konvergensi stunting yang baik dan benar ($OR < 1 = 0.76$). Hal ini sesuai dengan pendapat Picauly dkk (2020) dan Saputri (2019) yang menyatakan bahwa pelaksanaan aksi 1 (ANSIT) harus mendapat dukungan serius dari level pemerintah daerah mulai kabupaten sampai desa bersama semua stakeholder (pihak non pemerintah/swasta) masih sangat terbatas. Selain itu, perlu mendapat pendampingan untuk memantau semua kendala-kendala dilapangan dan menyempurnakan data analisis situasi untuk kelengkapan data konvergensi di aksi selanjutnya.

Pelaksanaan aksi 1 konvergensi stunting diawali dengan membahas data atau temuan dari proses analisis situasi (ANSIT). Dua hal penting yang menjadi tujuan pembahasan ANSIT adalah : 1). Membantu pemerintah kabupaten/kota dalam menentukan program/kegiatan yang diprioritaskan alokasinya dan 2). Menentukan upaya perbaikan manajemen layanan untuk meningkatkan akses rumah tangga 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) terhadap intervensi gizi spesifik maupun sensitif. Dengan demikian, hasil ANSIT dapat membantu untuk memahami permasalahan dalam integrasi intervensi gizi spesifik dan sensitif pada sasaran rumah tangga 1.000 HPK (Ditjen Bangda, Kemendagri RI, 2020 dan Bapenas, 2018). Hal ini berarti bahwa, semakin baik pelaksanaan aksi I konvergensi stunting akan semakin baik capaian cakupan program intervensi gizi sensitif. Selain itu, dapat menjadi dasar perumusan rekomendasi kegiatan yang harus dilakukan untuk meningkatkan integrasi intervensi gizi bagi rumah tangga 1.000 HPK. Tiga (3) kabupaten yang mempunyai persentase cakupan intervensi gizi sensitif dibawah 50% adalah Kabupaten Rote Ndao, Alor, dan Sikka. Hal ini diduga karena lemahnya penerjemahan dan dukungan kerjasama dari pelaksanaan ansit bersama lintas sektor terkait.

Penyusunan rencana kegiatan pada aksi 2 dimaknai sebagai rencana tindak lanjut kabupaten/kota dalam merealisasikan rekomendasi hasil analisis situasi (Ansit). Penelitian ini menemukan bahwa sebagian besar 61.9% OPD yang melaksanakan aksi

dua (2) konvergensi stunting dengan baik dibanding capaian pelaksanaan aksi lainnya (Tabel 1). Namun demikian, masih terdapat 38.5% OPD yang mempunyai cakupan intervensi yang rendah.

Hasil analisis statistik diketahui bahwa pelaksanaan aksi dua (2) konvergensi berpengaruh nyata terhadap tingkat cakupan program intervensi gizi sensitif ($p\text{-value} = 0.036 < 0.05$). Dimana, pelaksanaan aksi konvergensi kedua yang baik akan berdampak 1,688 kali untuk meningkatkan tingkat cakupan intervensi gizi sensitif (OR : 1,688). Data ini sesuai dengan hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagian besar (61.5%) OPD yang melakukan pelaksanaan aksi 2 konvergensi stunting mempunyai cakupan program intervensi gizi sensitif baik.

Setiap rencana akan berisikan program dan kegiatan OPD untuk meningkatkan cakupan layanan intervensi dan kegiatan untuk meningkatkan integrasi intervensi oleh kabupaten/kota dan desa pada tahun berjalan dan/atau satu tahun mendatang. Pemerintah kabupaten/kota selanjutnya mengintegrasikan Rencana Kegiatan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja OPD. Oleh karena itu, setiap pelaksanaan aksi konvergensi 2 harus berdasarkan keputusan atau rekomendasi aksi 1 (ANSIT). Sehingga kualitas rencana kegiatan yang disusun semakin baik dan terfokus akan baik untuk meningkatkan pelaksanaan integrasi intervensi gizi baik spesifik maupun sensitif (https://aksi.bangda.kemendagri.go.id/v2/in/main/data_detail/223/1451).

Rembuk stunting (Aksi 3) merupakan suatu langkah penting yang harus dilakukan pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan terjadinya integrasi pelaksanaan intervensi penurunan stunting secara bersama-sama antara OPD penanggung jawab layanan dengan sektor/lembaga non-pemerintah dan masyarakat. Pemerintah kabupaten/kota secara bersama-sama akan melakukan konfirmasi, sinkronisasi, dan sinergi hasil analisis situasi dan rancangan rencana kegiatan dari OPD penanggung jawab layanan di kabupaten/kota dengan hasil perencanaan partisipatif masyarakat yang dilaksanakan melalui Musrenbang kecamatan dan desa dalam upaya penurunan stunting di lokasi fokus.

Penelitian ini menemukan bahwa sebagian besar 66.7% OPD yang melaksanakan aksi tiga (3) konvergensi stunting dengan baik dibanding capaian pelaksanaan aksi lainnya (Tabel 1). Namun demikian, masih terdapat 33.3% OPD yang mempunyai cakupan intervensi yang buruk/rendah. Hal ini diduga karena masih terdapat pemerintah kabupaten/kota yang belum melakukan konfirmasi, sinkronisasi, dan sinergi hasil analisis situasi dan rancangan rencana kegiatan dari OPD penanggung jawab layanan di

kabupaten/kota dengan hasil perencanaan partisipatif masyarakat yang dilaksanakan melalui Musrenbang kecamatan dan desa dalam upaya penurunan stunting di lokasi fokus. Artinya, pemerintah daerah dan OPD terkait belum memberikan dukungan yang konkrit atau nyata untuk pelaksanaan program/kegiatan penurunan stunting yang telah disepakati dalam RKPD/Renja tahun tersebut.

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa pelaksanaan aksi 3 konvergensi berpengaruh nyata terhadap tingkat cakupan program intervensi gizi sensitif ($p\text{-value} = 0.000 < 0.05$). berdasarkan nilai *odd ratio* diketahui bahwa pelaksanaan aksi 3 konvergensi yang baik akan berpengaruh sebesar 3.744 kali pada peningkatan cakupan program intervensi. Hal ini berarti bahwa dukungan yang konkrit untuk pelaksanaan program/kegiatan penurunan stunting harus terintegrasi ke dalam perencanaan dan penganggaran tahunan daerah melalui kesepakatan Rembuk Stunting ke dalam RKPD, Renja OPD, dan APBD/APBD-P.

Saputri (2019) menyatakan bahwa upaya pencegahan stunting membutuhkan keterpaduan penyelenggaraan intervensi gizi pada lokasi dan kelompok sasaran prioritas (Rumah Tangga 1000 HPK). Untuk mencapai keterpaduan/integrasi tersebut diperlukan penyelarasan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian kegiatan lintas sektor serta antar tingkatan pemerintahan dan masyarakat. Untuk memberikan panduan bagi proses integrasi intervensi di tingkat Kabupaten/Kota. Dengan demikian terlihat bahwa antara aksi 1 – 3 saling memiliki keterkaitan yang utuh, sehingga wajib dijalankan secara bersama-sama dan dengan baik.

Pemerintah telah menetapkan penurunan stunting sebagai prioritas nasional yang dilaksanakan secara lintas sektor di berbagai tingkatan sampai dengan tingkat desa. Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa berkewajiban untuk mendukung kegiatan-kegiatan pembangunan yang menjadi program prioritas nasional. Oleh karena itu, pemerintah desa diharapkan untuk menyusun kegiatan-kegiatan yang relevan dengan penurunan stunting terutama yang bersifat skala desa melalui pemanfaatan Dana Desa-nya.

Pemerintah Pusat telah menganggarkan Dana Desa (ADD) yang cukup besar untuk diberikan kepada desa-desa, namun rata-rata alokasi ADD yang digunakan untuk kegiatan pembangunan yang terkait dengan penurunan stunting relatif masih sangat kecil. Selain itu, semua OPD yang terkait dalam proses penanggulangan stunting belum semuanya berhubungan atau mengintegrasikan program/kegiatannya dengan pemerintah desa.

Artinya semua OPD yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan penurunan stunting harus berhubungan dengan pemerintah desa.

Aksi 4 dan 5 konvergensi stunting merupakan dua hal yang saling terkait. Peraturan Bupati/Walikota (Aksi 4) yang dimaksud disini adalah peraturan yang menjelaskan peran dan kewenangan desa yang digunakan sebagai rujukan bagi pemerintah desa dalam merencanakan dan mengalokasikan anggaran dari APBDes termasuk Dana Desa untuk melaksanakan kegiatan integrasi intervensi penurunan stunting di tingkat desa. Sedangkan Kader Pembangunan Manusia (KPM) yaitu aksi 5 adalah kader yang berfungsi untuk membantu desa dalam memfasilitasi pelaksanaan integrasi intervensi penurunan stunting di tingkat desa. Kader tersebut berasal dari masyarakat sendiri seperti kader Posyandu, guru PAUD, dan kader lainnya yang terdapat di desa.

Penekanan penting terhadap kedua aksi ini (4&5) adalah peranan masing-masing. Pemerintah kabupaten/kota mempunyai kewajiban melakukan pembinaan, pengawasan, dan pemberdayaan masyarakat desa (Bappenas, 2018). Dimana, dalam kaitan dengan intervensi penurunan stunting terintegrasi, Pemerintah kabupaten/kota perlu melakukan dua hal berikut :

1. Menyediakan Peraturan Bupati/Walikota mengenai peran desa dalam intervensi penurunan stunting terintegrasi di tingkat desa. Peraturan yang dimaksud dapat berupa peraturan baru atau merevisi peraturan yang ada dan dinilai relevan dengan agenda penurunan stunting di kabupaten/kota.
2. Melakukan pembinaan bagi desa untuk memastikan efektivitas mobilisasi kader yang berfungsi sebagai kader pembangunan manusia (KPM) yang akan membantu desa dalam memfasilitasi integrasi intervensi penurunan stunting di tingkat desa. Kader tersebut berasal dari masyarakat sendiri seperti kader Posyandu, guru PAUD, dan kader lainnya yang terdapat di desa.

Integrasi kedua aksi ini sesuai dengan hasil penelitian ini yang menemukan bahwa kedua aksi tersebut sama-sama berpengaruh (Aksi 4 *pvalue* : $0.000 < 0.05$ & Aksi 5 *pvalue* : $0.024 < 0.05$) terhadap peningkatan cakupan program intervensi stunting. Hal ini berarti bahwa Peraturan Bupati/Walikota harus memperkuat posisi desa tentang peran desa dalam intervensi penurunan stunting dan membina perangkat desa dalam tugasnya memastikan efektivitas mobilisasi kader sebagai kader pembangunan manusia (KPM) dalam proses penurunan stunting di tingkat desa. Nilai odd ratio menunjukkan bahwa pelaksanaan aksi konvergensi 4&5 dapat berpengaruh sebesar 2,585 dan 3,172 kali

terhadap peningkatan cakupan program intervensi gizi sensitif. Walaupun demikian, masih terdapat 38.1% kabupaten yang cakupan program intervensi masih rendah atau buruk. Adapun kabupaten dimaksud adalah : Alor, Kupang, Manggarai Barat, dan Sikka. Hal ini diduga masih kurangnya dukungan dari pihak pemerintah daerah beserta sektor atau OPD terkait. Dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dan OPD-OPD lainnya yang terkait.

TNP2K menegaskan bahwa pengintegrasian ini bertujuan untuk memastikan komitmen program/kegiatan penurunan stunting yang sudah disepakati dalam Rembuk Stunting dan dituangkan dalam Rencana Kegiatan tercantum dalam RKPD, Renja OPD, dan R-APBD/RAPBD-P dan dilaksanakan secara terpadu (<http://tnp2k.go.id/filemanager/files/Rakornis%202018/Pedoman%20Pelaksanaan%20Intervensi%20Penurunan%20Stunting%20Terintegrasi%20Di%20Kabupaten%20Kota.pdf>).

Sistem manajemen data intervensi penurunan stunting (Aksi 6) merupakan upaya pengelolaan data di tingkat kabupaten/kota sampai dengan tingkat desa yang akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan aksi-aksi integrasi lainnya, serta dimanfaatkan untuk membantu pengelolaan program/kegiatan penurunan stunting terintegrasi. Sistem manajemen data mencakup data dari setiap indikator mulai dari data stunting sampai dengan cakupan intervensi gizi spesifik dan sensitif.

Penelitian ini menunjukkan bahwa 61.5% mempunyai cakupan program intervensi baik walaupun buruk dalam aspek manajemen data (Aksi 6). Sesuai dengan hasil penilaian kinerja kabupaten diketahui bahwa banyak OPD yang belum paham terkait proses pengumpulan data sampai pelaporan, walaupun semua program konvergensi sudah dijalankan dengan baik. Selain itu, masih ada beberapa OPD yang masih terikat dengan mekanisme pelaporan yang langsung ke pusat seperti Dinas P2KB, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, dan Dinas PUPR. Nilai *odd ratio* menunjukkan bahwa pelaksanaan aksi konvergensi 6 dapat berpengaruh sebesar 1,917 kali terhadap peningkatan cakupan program intervensi gizi sensitif.

Hasil penelitian ini mendukung pendapat dari Gani (2020) dan Picauly dkk (2020) menyatakan bahwa sistem manajemen data harus mencakup semua kegiatan mulai dari identifikasi kebutuhan data, pengumpulan data hingga pemanfaatan data, untuk memastikan adanya informasi yang akurat dan mutakhir dari level terendah/desa sampai level kabupaten. Kegiatan-kegiatan dalam sistem manajemen data akan bersinggungan dengan aspek kebijakan, akan menggunakan dan mendukung mekanisme yang berjalan di

kabupaten/kota, serta tidak terlepas dari dukungan teknologi informasi dalam pengumpulan dan pengelolaan data. Dengan demikian tujuan dari aksi 6 dapat terukur atau tercapai yakni membantu menyediakan dan mempermudah akses data untuk pengelolaan program penurunan stunting terintegrasi mulai dari data : Aksi 1 (Analisis Situasi), Aksi 2 (Penyusunan Rencana Kegiatan), Aksi 3 (Rembuk Stunting), Aksi 5 (Pembinaan KPM), dan Aksi 8 (Reviu Kinerja).

Pengukuran dan publikasi angka stunting (Aksi 7) adalah upaya pemerintah kabupaten/kota untuk memperoleh data prevalensi stunting terkini pada skala layanan puskesmas, kecamatan, dan desa. Penelitian ini menunjukkan bahwa 76,2% mempunyai cakupan program intervensi baik walaupun masih terbatas dalam aspek publikasi data. Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan ($p\text{-value} : 0.033 < 0.05$) terhadap cakupan program intervensi gizi sensitif. Hasil analisis *odd ratio* juga menunjukkan bahwa pelaksanaan aksi konvergensi 6 dapat berpengaruh sebesar 1,917 kali terhadap peningkatan cakupan program intervensi gizi sensitif. Hal ini berarti bahwa semakin baik proses pengukuran dan publikasi maka dapat berpengaruh terhadap pencapaian cakupan program intervensi termasuk penurunan prevalensi stunting. Sesuai dengan hasil penilaian kinerja kabupaten diketahui bahwa banyak OPD yang belum tuntas dalam proses pengukuran dan publikasi. Selain itu, masih banyak OPD yang masih terikat dengan mekanisme publikasi berbentuk sosialisasi data atau pengiriman data lintas OPD dan belum sampai ke masyarakat. Hal ini menyebabkan terputusnya informasi terkait perkembangan stunting beserta determinannya. Adapun OPD dimaksud adalah Dinas Kesehatan, Dinas P2KB, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, dan Dinas PUPR.

Hasil pengukuran serta publikasi angka stunting digunakan untuk memperkuat komitmen pemerintah daerah dan masyarakat dalam gerakan bersama penurunan stunting. Tata cara pengukuran stunting tetap berpedoman pada regulasi Kementerian Kesehatan atau kebijakan lainnya yang berlaku.

Reviu Kinerja Tahunan (Aksi 8) adalah reviu yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota terhadap kinerja pelaksanaan program dan kegiatan terkait penurunan stunting selama satu tahun terakhir. Penyelenggaraan intervensi penurunan stunting terintegrasi merupakan tanggung jawab bersama lintas sektor. Untuk itu, diperlukan sebuah tim lintas sektor sebagai pelaksana Aksi Integrasi. Keanggotaan tim lintas sektor tersebut sekurang-kurangnya mencakup instansi yang menangani: kesehatan, pertanian,

ketahanan pangan, kelautan dan perikanan, pendidikan, perindustrian, sosial, agama, komunikasi dan informasi, pekerjaan umum/cipta karya/perumahan dan pemukiman, pemberdayaan masyarakat desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kependudukan catatan sipil dan keluarga berencana, dan pengawasan obat dan makanan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa 52,4% mempunyai cakupan program intervensi baik walaupun masih banyak kabupaten yang terbatas dalam aspek informasi terkait realisasi rencana kegiatan penurunan stunting; realisasi anggaran program/kegiatan penurunan stunting; faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja dan identifikasi alternatif solusi; perkembangan capaian outcome (prevalensi stunting), dan faktor rekomendasi perbaikan.

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan ($p\text{-value} : 0.047 < 0.05$) terhadap cakupan program intervensi gizi sensitif. Hasil analisis *odd ratio* juga menunjukkan bahwa pelaksanaan aksi konvergensi 8 dapat berpengaruh sebesar 1,719 kali terhadap peningkatan cakupan program intervensi gizi sensitif. Hal ini berarti bahwa semakin baik proses review kinerja tahunan maka dapat berpengaruh terhadap pencapaian cakupan program intervensi termasuk penurunan prevalensi stunting.

Penanggungjawab penuh dalam aksi ini adalah Sekretaris Daerah dan Bappeda kabupaten/kota. Dalam dokumen Bapenas (2018) di atur bahwa Sekretaris Daerah bertanggung jawab untuk memimpin dan mensupervisi proses dan hasil review. Bappeda bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan penyiapan materi review. Dalam pelaksanaan review, harus dibentuk “Tim Pelaksana Review Kinerja” yang melibatkan seluruh OPD yang bertanggung jawab untuk penyediaan intervensi gizi spesifik dan sensitif.

Jika penelitian ini masih menemukan 23,8% kabupaten yang kurang baik dalam melaksanakan review berarti belum melaksanakan proses review dengan melibatkan tokoh-tokoh yang bertanggungjawab penuh seperti SekDa dan Bappeda serta tidak berkoordinasi dalam “Tim Pelaksana Review Kinerja”. Berdasarkan hasil penilaian kinerja diketahui bahwa masih banyak kabupaten yang belum tuntas dalam proses pelaporan dan review. Adapun kabupaten dimaksud berasal adalah Alor, Malaka, Sikka, Sumba Barat Daya, Manggarai Barat, Kupang, Belu dan TTU.

Hal ini berarti bahwa pelaksanaan konvergensi di level pemerintah daerah masih sangat terbatas. Faktor ini juga diperparah dengan adanya kondisi pandemic Covid-19 yang secara langsung mempengaruhi kinerja penanganan Stunting. Hal lainnya yang

mempengaruhi adalah belum digunakannya satu sistem data yang menjadi acuan bersama untuk melakukan aksi konvergen pada lokasi yang telah ditetapkan yang tentunya setelah melalui analisis yang kuat berdasarkan data hasil penimbangan balita yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, pendampingan dirasakan perlu dilakukan untuk memantau secara dekat kendala-kendala di lapangan. Adapun metode pendampingan yang dilakukan adalah kombinasi dengan metode penyuluhan dan simulasi.

Hasil penelitian Picauly dkk (2019) menyatakan bahwa rendahnya pemahaman Aparatur Sipil Negara (ASN) tentang stunting dan fungsi konvergensi serta pelaksanaan lintas stakeholder yang masih buruk. Rekomendasi yang diberikan adalah meningkatkan pemahaman ASN tentang stunting dan konvergensi, mensimulasikan mekanisme konvergensi serta menyempurnakan data analisis situasi untuk kelengkapan data konvergensi di aksi selanjutnya. Sehingga, upaya untuk penurunan stunting ini perlu dilakukan penguatan dengan dukungan semua pihak baik pemerintah, swasta, perguruan tinggi maupun masyarakat melalui intervensi spesifik maupun sensitif.

PENUTUP

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan Aksi Konvergensi Stunting (1-8) berpengaruh nyata terhadap cakupan program intervensi stunting di wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur
2. Analisis Situasi (Aksi 1) konvergensi stunting dapat menjadi faktor proteksi terhadap baik dan buruk cakupan program intervensi gizi sensitif di wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Aksi konvergensi 2-8 dapat menjadi faktor risiko baik dan buruk cakupan program intervensi gizi sensitif di wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Pelaksanaan aksi konvergensi dengan dukungan pemerintah daerah akan berpengaruh nyata terhadap peningkatan cakupan program intervensi gizi sensitif dan spesifik.

DAFTAR PUSTAKA

Aspar Abdul Gani. 2020. Disertasi : Studi Operasional Penurunan Stunting Melalui Upaya Konvergensi Di Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah.
http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/3074/3/K013172013_disertasi%201-2.pdf

- Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Riau. 2021. Konvergensi Dalam Percepatan Penurunan Stunting. <https://bkd.riau.go.id/berita/konvergensi-dalam-percepatan-penurunan-stunting>.
- Hari Nur Cahya Murni. 2021. Kemajuan Konvergensi Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting Di Tingkat Kabupaten/Kota. Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Intje Picauly, Sarah Lery Mboeik, Theresia Sri Lendes, Sherly Hayer. 2020. Pendampingan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Manggarai Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat “Kepulauan Lahan Kering” Vol. 1 No. 2 (2020): Volume 1 Nomor 2 Edisi Oktober 2020. <https://pergizipanganntt.id/ejpazih/index.php/jpmkelaker/issue/view/9>.
- Intje Picauly, Theresia M. Sri Sarinah Lendes, Ivon Patrisia Paah, Robertha Kartini. 2021. Pendampingan 25 Indikator Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) Propinsi Nusa Tenggara Timur. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat “Kepulauan Lahan Kering”. Vol. 2 No. 1 (2021): Volume 2 Nomor 1 Edisi April 2021. <https://pergizipanganntt.id/ejpazih/index.php/jpmkelaker>.
- Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional. 2018. Pedoman Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Di Kabupaten/Kota.
- Rini Archda Saputri. 2019. Upaya Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Stunting Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jurnal Dinamika Pemerintahan Vol.2, No. 2. <https://media.neliti.com/media/publications/322198-upaya-pemerintah-daerah-dalam-penanggula-0c69866f.pdf>
- Suprayoga Hadi. 2021. Capaian, Tantangan Dan Peluang Pelaksanaan Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting Tahun 2018 – 2024.
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Setwapres, 2018. Panduan Konvergensi Program/Kegiatan Percepatan Pencegahan Stunting. [http://tnp2k.go.id/filemanager/files/Rakornis 2018/Panduan Konvergensi Program Kegiatan Percepatan Pencegahan Stunting.pdf](http://tnp2k.go.id/filemanager/files/Rakornis%202018/Panduan%20Konvergensi%20Program%20Kegiatan%20Percepatan%20Pencegahan%20Stunting.pdf)
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). 2017. 100 Kabupaten/Kota Prioritas untuk Intervensi Anak Kerdil (Stunting). Sekretariat Wakil Presiden, Jakarta.